**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN**

(Studi Kasus Kecamatan Mandau)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru

Widyana Sari
NPM : 137310021

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul : **Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)**

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan motivasi pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antarlain :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.Cl. karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua program studi yang telah memfasilitasi dan memebrikan ilmu pengetahuan terhadap penulis dalam meneyelesaikan usulan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.

5. Bapak beserta ibu Dosen Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Islam Riau Dan Staf Tata Usaha yang telah membantu selama mengikuti kegiatan akademis.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas doa dan restu yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
7. Saudara-saudaraku dan sahabat tersayang yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada para pembaca sekalian dan penulis sangat mengharapkan saran-saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan usulan penelitian ini dan semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca untuk masa yang akan datang.

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis,

Widyana Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	11
2. Konsep Kebijakan	13
3. Konsep Kinerja Pegawai	15
4. Evaluasi Kebijakan	17
5. Konsep Pembinaan	19
6. Anak Jalanan	20
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir	26
D. Konsep Operasional	27
E. Operasional Variabel	27
F. Teknik Pengukuran	29
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Teknik Penarikan Sampel	33
E. Jenis dan Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	36

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	37
A. Kabupaten Bengkalis	37
B. Kecamatan Mandau	38
1. Pemerintah	39
2. Penduduk	40
3. Kesehatan	40
4. Sosial	41
5. Perekonomian	41
C. Stuktur Organisasi Dinas Sosial Bengkalis dan Unit Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial Kecamatan Mandau	42
D. Sumberdaya Organisasi	45
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Identitas Informan	48
1. Jabatan informan	48
2. Jenis Kelamin	49
3. Usia Informan	50
4. Pendidikan informan	50
B. Hasil Penelitian	51
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Anak Jalanan yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	8
II.1 : Penelitian Terdahulu	24
II.2 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)	28
III.1 : Jumlah Populasi Dan Sample	33
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian	36
IV.1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan	46
V.1 : Gambaran Responden	49
V.2 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Efektifitas.....	53
V.3 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Efisiensi.....	57
V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Kecukupan	60
V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Perataan.....	63
V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Responsivitas	66
V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan	69
VI.1 : Distribusi Tanggapan Responden Penelitian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Menekan Angka Anak Jalanan Di Kabupaten Bengkalis Terkhusus Kecamatan Mandau	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)	26
VI.1 : Struktural Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	43
VI.2 : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Dinas Sosial Kecamatan Mandau	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar kuissioner (untuk responden Kepala UPTD Sosial Kecamatan Mandau) penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)	78
2 : Daftar kuissioner (untuk responden Masyarakat) penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau).....	85
3 : Daftar kuissioner (untuk responden Anak Jalanan) penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau).....	92
4 : Daftar Telly Data Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau).....	99
5 : Photo Dokumentasi Hasil observasi penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (studi Kasus Kecamatan Mandau)	111
6. : SK Dekan Fisipol UIR Nomor 108/UIR-Fs/Kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An. Widyana Sari	114
7. : Surat Riset Pemerintahan Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	115

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widyana Sari
NPM : 137310021
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus
Kecamatan Mandau)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan adminitratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru , 18 Juli 2020

Pelaku pernyataan

Widyana Sari

EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN

ABSTRAK

Widayana Sari

Penelitian ini didasari oleh bagaimana Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau) didasari dari penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial yang bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menekan angka anak jalanan di Kabupaten Bengkalis terkhusus Kecamatan Mandau. Menjelaskan kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menekan angka anak jalanan di Kabupaten Bengkalis terkhusus Kecamatan Mandau. Adapun faktor faktor penghambatnya adalah sebagai berikut dimana masih kurang tepatnya bentuk program pelatihan yang di berikan selama ini. Masih banyak anak jalanan yang tidak mengikuti pelatihan yang bertujuan agar mereka mampu bersaing di dunia kerja. Anak jalanan yang selalu berpindah-pindah juga menjadi hambatan untuk UPTD Sosial dalam mengawasi mereka. Pelaksanaan program seharusnya lebih di fokuskan menghasilkan anak jalanan yang memiliki usaha sendiri. dan faktor lainnya adalah pengawasan setelah di berikan program pelatihan seharusnya lebih di tingkatkan dan di bantu untuk anak jalanan bisa menciptakan usaha mandiri.

Kata Kunci :Evaluasi Kinerja, Dinas Sosial, Anak Jalanan

PERFORMANCE EVALUATION OF SOCIAL SERVICE OF BENGKALIS DISTRICT IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN

ABSTRACT

Widyana Sari

This research is based on how the Bengkalis Regency Social Service Evaluation in the Development of Street Children (Case Study of the District of Mandau) is based on the implementation of social guidance, rehabilitation and social services and protection of social problems that aim to determine the performance of the Bengkalis Regency Social Service in suppressing the number of street children in Bengkalis Regency, especially Mandau District. Explain the obstacles faced by Bengkalis Regency Social Service in suppressing the number of street children in Bengkalis Regency, specifically Mandau District. The inhibiting factors are as follows where it is still not quite the exact form of training programs provided so far. There are still many street children who do not attend training aimed at making them able to compete in the world of work. Street children who are always on the move are also obstacles for UPTD Social in supervising them. Implementation of the program should be more focused on producing street children who have their own businesses. And another factor is that supervision after being given a training program should be increased and assisted for street children to create independent businesses.

Keywords: Performance Evaluation, Social Service, Street Children

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu kabupaten dan kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah-daerah tersebut kesemuanya diatur menurut undang-undang. Undang – Undang dasar 1945 sebagai sumber utama kehidupan Konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perkehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terintegral dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Dengan dibentuknya otonomi daerah mampu memberikan kontribusi kepada daerah-daerah untuk berkembang dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya dan kebutuhan sosial yang juga tinggi.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 12 tersebut diatas menjelaskan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah adalah Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuang bangsa. Agar kelak anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan pembangunan anak menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan penerus bangsa di generasi selanjutnya, sehingga mereka harus di persiapkan dan di arahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, mandiri dan sejahtera yang akan menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan yang ada di masa datang. Oleh karena itu upaya perkembangan anak harus di mulai sejak dini.

Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak hak nya karna tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang mencari uang di jalanan sebagai anak jalanan atau pun pengemis. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang di sengaja atau di paksa untuk mencari uang oleh orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Maka dari itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Karna hak asasi anak tersebut merupakan nagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional.

Hak asasi anak di perlakukan berbeda dari orang dewasa karna anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pada hakikatnya anak tidak di bolehan bekerja karna waktu mereka selayaknya di manfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita cita sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, Mereka juga berhak atas hak pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut maka pemerintah menuangkannya pada suatu kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, oleh karena itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial

Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang 1945 terdapat dalam pasal 34 yang berbunyi : *“fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”* . hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus di lindungi, dan di bina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak pasal 1 ayat (2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martbat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak no 35 Tahun 2014 menjelaskan Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Hak anak antara lain sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan pihak lain.

Dari hak anak yang terdapat di dalam undang-undang tersebut belum terjadi maksimal di Kecamatan Mandau. Pada kenyataannya masih banyak anak-anak di bawah umur harus hidup di jalanan bahkan harus mengemis dan mengamen di Kecamatan Mandau karena tuntutan Ekonomi.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti pengemis dan pengamen ataupun pekerja anak lainnya yang masih berkeliaran di tempat umum di

Kecamatan Mandau mempunyai titik tertentu dimana mereka melakukan aktifitas seperti di Lampu Merah, dan di pusat berbelanja. Hal ini sungguh meresahkan masyarakat, karna ada sebagian pengemis yang meminta-minta dengan memaksa dan terkadang anak yang di bawah umur di paksa pengemis di jalanan umum seperti pusat perbelanjaan sampai waktu malam.

Anak jalanan adalah seorang anak yang berada di jalanan untuk hidup maupun bekerja dengan memasuki kegiatan ekonomi di jalan, seperti pedagang asongan, semir sepatu, pedagang koran, pengamen, mengelap kaca mobil, penyewa payung di waktu hujan, dan sebagainya (Anonim, 2004 dalam Pramuchita 2008).

Anak jalanan termasuk kategori anak telantar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “*Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial*”. Pada realistiknya sehari-hari kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi. Anak jalanan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksploitasi (Nugroho, 2014).

Dengan adanya anak jalanan yang berada di tempat tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di antaranya :

1. Masalah lingkungan (tata ruang)

Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karena itu mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

2. Masalah kependudukan

Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

3. Masalah keaman dan ketertiban

Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengacu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

4. Masalah kriminalitas

Memang tak dapat kita sangal banyak sekali faktor penyebab dari kriminalitas ini di lakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian mulai dari pencurian kekerasan hingga samapi pelecehan seksual ini kerap sekali terjadi.

Pertanyaan yang muncul kenapa banyaknya anak di bawah umur yang menjadi tameng buat menghasilkan uang, sedangkan banyaknya bahaya yang menanti untuk anak-anak yang di jalanan mencari uang dan bisa kita lihat bahwa banyaknya pengemis anak-anak di bawah umur yang di sebabkan karna kurangnya pengawasan dari lembaga yang berwenang dalam menangani hal seperti ini seperti Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas kesejahteraan Sosial yang ada di daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Padahal seharusnya anak-

anak tersebut bukan bekerja di usia mereka tapi mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang semestinya.

Selanjutnya adapun jumlah anak jalanan dalam beberapa tahun bekangan penulis paparkan pada tabel berikut:

Tabel I.1 : Data Anak Jalanan yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2018	14	11	25
2	2017	11	10	21
3	2016	16	2	18

Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya peneliti menemukan bahwa:

1. Meningkatnya jumlah anak jalanan ini di setiap tahunnya sangat berhubungan erat dengan bagaimana peran dan kinerja dari aparat terkait karena ini menjadi tugas wajib mereka bagaimana menekan angka anak jalanan
2. Kurang Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial sebagai tugas wajib serta Visi dan Misi belum dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Sosial dalam lingkup Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas kesejahteraan Sosial Kecamatan Mandau.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Unit Pelaksaan Teknis (UPT) belum terlaksana kan seutuhnya dan anak jalanan yang ada di Kecamatan Mandau yang tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak jadi penelitian ini di harapkan bisa mengkaji permasalahan kenapa masih banyak berkeliaran di jalan raya dan tempat

umum lainnya anak-anak jalanan ini yang semestinya mereka bisa mendapatkan hak untuk belajar dan bermain sehingga peneliti selanjutnya bisa menemukan solusi apa yang bisa di jalankan oleh pihak terkait melalui penelitian yang berjudul **Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau).**

B. Rumusan Masalah

Dari pernyataan diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)”** didasari dari Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menekan angka anak jalanan di Kabupaten Bengkalis terkhusus Kecamatan Mandau.
2. Menjelaskan kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menekan angka anak jalanan di Kabupaten Bengkalis terkhusus Kecamatan Mandau.

b. Kegunaan penelitian

Setelah penelitian ini di laksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai dengan data di lapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang

berguna di dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama tentang konsep-konsep tentang kerja organisasi dengan kenyataan empiris yang dilapangan dan guna untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang penulis lakukan.
2. Kegunaan praktis, sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
3. Kegunaan akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain dalam kajian penelitian yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,” jadi normatif, ideal, *das Sollen*), dan kedua dari sudut senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, *das Sein*).

Menurut Syafiie (2011;11) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat

dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Labolo (2011;2) Ilmu Pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Gaffar (dalam Ndraha. 2010;16) mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Brasz (dalam Syafiie. 2007;20) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Sedangkan Ismani (1996;8) pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu proses tempat pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Kemudian menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

2. Konsep Kebijakan

Ndraha mengatakan dalam bukunya kybernology (ilmu pemerintahan baru) (2011;491) bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa “*policy*” adalah “*a course of action*”. Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson (dalam Ndraha, 2011;491) “*policy is a pattern of collective action*”.

Menurut Holwet dan Ramesh dalam (Subarsono, 2005;13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemserintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan yang dilihat dari kebijakn public yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan public untuk meningkatkan kehidupan public itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sember daya manusia.

Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Nurcholis, 2007;264)

Menurut Koryati (2005;2007) kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Pendapat Ripley dan Franklin berikut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Indikator pertama memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program. (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:69)
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi; (dalam Akib, Haedar 2010).
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/

pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. (dalam Akib, Haedar.2010).

Jadi pendapat yang di kemukakan oleh Ripley dan Franklin ini peneliti gunakan sebagai indikator penilaian bagaimana Analisis Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Mengawasi Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau) ini.

3. Konsep Kinerja

Menurut Mahsun (2006:25) Kinerja (*peformance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang telah di tetapkan. Mahsun (2006:31) memaparkan bahwa organisasi publik memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Sehingga organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya mengukur tingkat efisiensi. Pengukuran kinerja Pegawai sektor publik meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.

4. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Menurut Mangkunegara (2006), suatu kinerja dipengaruhi tiga faktor, yaitu:

1. Faktor individual yang mencakup kemampuan, keahlian, latar belakang dan demografi
2. Faktor psikologis terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan motivasi, dan
3. Faktor organisasi terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan job design.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pengertian kinerja dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian hasil yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kriteria dan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pimpinan organisasi guna mewujudkan tujuan organisasi.

4. Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn (1999: 608-610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan.

Arikunto (2004:4) mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data informasi tentang pekerjaannya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk membentuk alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Kemudian evaluasi kebijakan public adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikato-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek : aspek proses dan haasil (dalam Indiahoo, 2009;145).

Menurut Ndraha (2011:201-202) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standard an fakta dan analisis hasilnya .

Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya adalah :

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, *treatment*). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
2. Model das solen-das sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das solen.

3. Model kelompok control-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tampa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Sydam (2000:12) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan.

Kemudian Wiyono (2001:71) mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang mengukur dan member nilai secara objektif dan valid, dimana sebagian besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh subarsono (2009:119) bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya, evaluasi berguna untuk member input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Syukur (dalam Maryadi, 2005:79) bahwa terdapat tiga unsur penting dalam proses evaluasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijaksanaan yang dilakukan.

2. Adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang jadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan.

Kemudian Thomas Dye (dalam Parson, 2006:547) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, dan empiric terhadap efek dari kebijakan dan program public terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya Suchman (dalam Winarno, 2007:230) mengemukakan bahwa ada beberapa langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Anaisis dan standarisasi kegiatan.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjado.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

5. Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan

organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Pembinaan juga dapat diartikan : “ bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

6. Anak Jalanan

Pengertian anak jalanan telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya oleh Utoyo (dalam Munawir Yusuf dan Gunarhadi, 2003: 7) menyebutkan bahwa anak jalanan adalah “anak yang waktunya sebagian besar dihabiskan di jalan, mencari uang dan berkeliaran di jalan dan di tempat-tempat umum lainnya yang usianya 7 sampai 15 tahun”. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Soedijar (dalam Dwi Hastutik, 2005: 15) bahwa “anak jalanan adalah anak-anak berusia 7-15 tahun, bekerja di jalanan dan tempat umum lainnya yang dapat membahayakan keselamatan dirinya”. Sedangkan Sugeng Rahayu (dalam Dwi Astutik, 2005: 15) berpendapat lain bahwa “anak jalanan adalah anak-anak yang berusia di bawah 21

tahun yang berada di jalanan untuk mencari nafkah dengan berbagai cara (tidak termasuk pengemis, gelandangan, bekerja di toko/kios).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan. Selain itu juga ada yang masih bersekolah dan ada yang tidak bersekolah serta ada yang masih berhubungan dengan keluarga dan ada yang sudah lepas dari keluarga.

Menurut Departemen Sosial (dalam Dwi Astutik, 2005: 21-22), “karakteristik anak jalanan meliputi ciri-ciri fisik dan psikis”. Ciri-ciri fisik antara lain: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, dan pakaian tidak terurus. Sedangkan ciri-ciri psikis antara lain: mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, semangat hidup tinggi, berani menanggung resiko, dan mandiri. Lebih lanjut dijelaskan indikator anak jalanan antara lain:

- a. Usia berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun.
- b. Waktu yang dihabiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap hari.
- c. Tempat anak jalanan sering dijumpai di pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman kota, daerah lokalisasi PSK, perempatan jalan raya, pusat perbelanjaan atau mall, kendaraan umum (pengamen), dan tempat pembuangan sampah.

- d. Aktifitas anak jalanan yaitu; menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan koran atau majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa.
- e. Sumber dana dalam melakukan kegiatan: modal sendiri, modal kelompok, modal majikan/patron, stimulan/bantuan.
- f. Permasalahan: korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, ditangkap petugas, konflik dengan anak lain, terlibat tindakan kriminal, ditolak masyarakat lingkungannya.
- g. Kebutuhan anak jalanan: aman dalam keluarga, kasih sayang, bantuan usaha, pendidikan bimbingan ketrampilan, gizi dan kesehatan, hubungan harmonis dengan orangtua, keluarga dan masyarakat.

Anak jalanan yang turun yang ke jalan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dari anak yang satu dengan yang lainnya. Sehingga anak jalanan yang ada di jalan tersebut tidak bisa disamakan begitu saja. Akan tetapi yang jelas kehidupan mereka akan berbeda jika dibandingkan dengan kehidupan anak biasa yang tidak menjadi anak jalanan. Oleh karena itu anak jalanan tersebut dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Menurut Tjoemi S. Soemiarti (2004: 197), anak jalanan merupakan bagian kehidupan anak yang memiliki ciri-ciri khusus dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. *Kelompok high risk to be street children* yaitu anak jalan yang masih tinggal dengan orang tua, beberapa jam di jalanan kemudian kembali ke rumah.

- b. *Kelompok children on the street* yaitu mereka melakukan aktivitas ekonomi di jalanan dari pagi hingga sore hari. Dorongan ke jalan disebabkan oleh keharusan membantu orang tua atau untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.
- c. *Kelompok children of the street* yaitu mereka telah terputus dengan keluarga bahkan tidak lagi mengetahui keberadaan keluarganya. Hidup di jalanan selama 24 jam, menggunakan fasilitas mobilitas yang ada di jalanan secara gratis.

Pengelompokan anak jalanan di atas menitikberatkan pada hubungan anak jalanan dengan keluarganya, dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu anak yang masih tinggal dengan orang tua, anak jalanan yang menjadi urban ke kota dan jarang pulang dan anak jalanan yang sudah terputus dengan keluarganya.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa anak jalanan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu anak jalanan yang seluruh waktu dan hidupnya berada di jalanan, anak jalanan yang tempat tinggalnya di kota dan masih ada hubungan dengan keluarga, dan anak jalanan yang menjadi urban di kota yang ada hubungan dengan keluarga.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum dengan topik yang sama.

No	Nama	Judul	Teori	Hasil Penelitian
1	Meyfisca Chintya	Evaluasi Pelaksanaan Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai dalam Membina Anak Remaja Terlantar di Kota Pekanbaru	Ndraha 2003: a. Seharusnya b. Kenyataanya	Pelaksanaan Program Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai dalam Membina Anak Remaja Terlantar di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik berdasarkan indikator Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan
2	M Yafiz	Efektifitas Pembinaan Keterampilan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Efendi 2002 meliputi: b. Koordinasi c. Sumber Daya d. Himbauan e. Sosialisasi	Pembinaan anak jalanan sudah berjalan dengan cukup baik berdasarkan indikator rehabilitasi dan peningkatan potensi diri anak jalanan yang di rehabilitasi dan di berikan keahlian dan keterampilan khusus
3	Vani Vabiola	Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan melalui Program Rumah Singgah Dari Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso	Dunn (2000,608) meliputi : a. Efektifitas b. Efisiensi c. Kecukupan d. Pemerataan e. Responsibilitas f. ketepatan	Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak ada di jalanan kebanyakan karena tingkat ekonomi yang rendah dan program rumah singgah di anggap berhasil menekan anak jalanan dengan berbagai keahlian yang di berikan oleh Lembaga Sosial dan Dinas Sosial
4	Kurnia Putry Jasty	Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Anak Jalanan di Pekanbaru	Kumorotomo (2010;180) a. Efisiensi b. Efektifitas c. Keadilan d. Daya Tangkap	Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru khususnya bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial dalam menangani anak jalanan masih kurang baik. Usaha yang dilakukan belum mencapai target yang di inginkan

5	Kasmanto Rinaldi dan Andriyus	Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman atas Hak-Hak Anak di Kota Pekanbaru	Van Meter dan Van Horn (2008;141-144) a. Standar dan sasaran kebijakan b. Sumber daya c. Komunikasi antar badan pelaksana d. Karakteristik Badan Pelaksana e. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik f. Sikap Pelaksana	Hambatan yang dialami Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melindungi Hak-Hak anak di Pekanbaru sebagai berikut 1. Masih kurangnya pengalokasian anggaran dalam pembinaan anak jalanan 2. Masih belum adanya fasilitas pendukung pembinaan anak jalaan sepeti ruma singgah atau sejenisnya 3. Kurnagnya respon pelaksana dalam melaksanakan kebijakan 4. Karakteristik kelompok sasaran yang tidak mau di bina
---	-------------------------------	---	--	---

Sumber : *Olahan Peneliti 2019*

Ada pun perbedaa penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah si peneliti melihat sejauh ini pembinaan kepada anak jalanan tidak pernah di lakukan khusus nya kota duri Kecamatan Mandau yang memerlukan pembinaan khusus dalam membina anak jalan yang berada di Kecamatan Mandau dan memberikan pembinaan sosial dan agar mencapai hak-hak anak dalam perlindungan anak yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis memperjelaskan tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemerintahan merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan Pemerintahan.
2. Kinerja yang di kaji adalah bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan berdasarkan konsep William Duun yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan ,Responsivitas, Ketepatan

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel merupakan batasan penilaian yang telah ditentukan dalam penilaian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, operasional variabel disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dalam penyusunan uraian konsep variabel, yang mana terdiri dari indikator, ukuran, dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Operasional Variabel tentang Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
Evaluasi adalah penaksiran (appraisal) pemberian angka (ranting) dan penilaian (asement), hasil yang menyangkut usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat di katakana bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan di buat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 : 608)	Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)	a. Efektivitas	a. Bagaimana keefektifan kebijakan yang sudah pernah di buat dalam menurunkan jumlah anak jalanan.	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik
		b. Efisiensi	b. Bagaimana keefektifan pemberian hak untuk anak jalanan dalam hal pendidikan dan keterampilan.	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik
			a. Bagaimana Efisiensi dari Bentuk Pemberdayaan Anak jalanan yang ada agar tidak mengganggu keamanan.	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik
		c. Kecukupan	b. Bagaimana efisiensi dari Bentuk perlindungan masyarakat terhadap kriminal dari anak jalanan.	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik
			a. Bagaimana kecukupan jaminan sosial terhadap anak jalanan yang ada saat ini	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik
		d. Perataan	b. Apakah keputusan yang di buat sudah menyentuh seluruh anak jalanan	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik
e. Responsivitas	a. Bagaimanakah Respon dari pihak terkait dalam menindak lanjuti kriminalitas anak jalanan?	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik		
	b. Bagaimana respon dinas terkait terhadap peningkatan jumlah anak jalanan.	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik		
f. Ketepatan	a. Bagaimana ketepatan program yang di buat sejauh ini?	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik		
	b. Bagaimana program yang sudah di jalankan bisa menumbuhkan sifat anak jalanan yang bisa mandiri dan kreatif.	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik		
		a. Terciptanya Perkembangan Kemampuan anak	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik	
		b. Pencapaian dari rehabilitasi yang sudah pernah dilakukan	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang Baik	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

1. Teknik Pengukuran

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka dalam pengukuran variabel Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Mengawasi Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau) diukur dengan menggunakan ukuran Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik terhadap seluruh indikator yang ada. Adapun ukuran yang diberikan pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

- Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 67-100%
- Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 34-66%
- Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 0-33%

2. Efisiensi

- Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 67-100%
- Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 34-66%
- Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 0-33%

3. Kecukupan

- Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 67-100%
- Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 34-66%
- Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 0-33%

- Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 67-100%
- Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 34-66%
- Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 0-33%

4. Responsivitas

- Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 67-100%
- Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 34-66%
- Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 0-33%

5. Ketepatan

- Baik : Apabila tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 67-100%
- Cukup Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 34-66%
- Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori berada pada rentang persentase 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Karena penelitian ini bermaksud memberikan hasil analisa informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang jelas dari hasil analisisnya. Penelitian ini menghadirkan gambaran tentang bagaimana Pembinaan anak jalanan yang ada di Kecamatan Mandau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kuantitatif

Metode penelitian *kuantitatif* merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7). Metode kuantitatif sering

juga disebut metode tradisional, positivistik, ilmiah/scientific dan metode discovery.

Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai (*value free*). Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara lain melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Peneliti yang melakukan studi kuantitatif mereduksi sedemikian rupa hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelaahan muncul adanya bias itu maka penelitian kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmiah yang sesungguhnya (Sudarwan Danim, 2002: 35).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penelitian ini adalah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tepatnya di Ibu Kota Kecamatan Mandau yaitu Duri. Kecamatan Mandau merupakan sebuah kecamatan yang luar biasa kaya dimana terdapat banyak ladang minyak yang memiliki kualitas sangat baik, dimana ladang minyak di daerah Duri sudah di eksploitasi dari tahun 50-an dan masih memproduksi sampai sekarang dan Duri menyumbang 60% produksi minyak mentah Indonesia yang di produksi oleh kontraktor besar seperti Chevron, Schlumberger, Haliburton dan konsorsium lainnya dan masyarakat yang majemuk juga menggunakan tanaman sawit sebagai penghasilannya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun didalam hal ini yang membedakan adalah :

1. Populasi

Menurut Usman dan Akbar (2011;42), menyatakan populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar, 2011;43), untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Kepala UPDT Sosial	1	1
2.	Anak Jalanan	25	10
3	Masyarakat	239.513	50
Jumlah		61	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik penarikan sampel, untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis penulis menggunakan teknik sensus, karena jumlah populasi yang sedikit sehingga mudah diperoleh.

Sedangkan teknik penarikan sampel yang populasinya banyak adalah anak jalanan dan masyarakat, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan kelompok subjek yang mempunyai sifat tertentu yaitu anak jalanan yang ada di Kecamatan mandau yang berusia mulai dari 17 Tahun dan masyarakat juga menggunakan teknik purposive sampling dimana yang berada di sekitaran aktifitas anak jalanan serta mempunyai hubungan yang kuat dengan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya yang menjadi sample, teknik ini dipilih untuk menghemat waktu serta biaya disebabkan banyaknya populasi yang ada untuk diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan anak jalanan yang ada di Kecamatan Mandau seperti dokumentasi anak jalanan dan keadaan anak jalanan di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan Pelaksanaan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Mengawasi Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau) dan penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang sangat relevan dengan permasalahan ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan penelitian sebagai tujuan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak

langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.

2. Kuisioner

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi daftar pertanyaan kepada responden penelitian dan masyarakat mengenai Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Mengawasi Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau. Dengan cara memberikan kuisioner langsung kepada responden untuk langsung di isi sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh responden yang diharapkan dapat memberi jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dan informasi terkumpul dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian melalui instrument atau alat penilaian berupa daftar pertanyaan atau kuisioner dan daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan dan di olah untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini secara kualitatif, lalu data tersebut dikelompokkan berdasarkan pada masing-masing indikator

variabel dan kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut dianalisis secara Kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi yang ada. Hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)

NO	Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP									■	■	■	■												
3	Revisi UP													■	■	■	■								
4	Revisioner																	■	■	■	■				
5	Rekomendasi Survey																					■	■	■	■
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. KABUPATEN BENGKALIS

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan luas 7.793,93 km^2 , terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara $2^{\circ}7'37,2''$ - $0^{\circ}55'33,6''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}57'57,6''$ - $102^{\circ}30'25,2''$ Bujur Timur.

Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 km^2 (32,20%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 km^2 (5,46%). Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Mandau yang ibukotanya adalah Kelurahan Air Jamban (Duri) dengan jarak lurus 103 km. sedangkan yang

memiliki jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah Desa Selat Baru yang merupakan ibukota dari Kecamatan Bantan dan Kelurahan Sungai Pakning yang merupakan ibukota Kecamatan Bukit Batu dengan jarak lurus 15 km.

B. KECAMATAN MANDAU

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah terbesar ketiga setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu, dengan luas wilayah yang mencapai $937,47 \text{ km}^2$. Kecamatan Mandau berada di Pulau Sumatera terbentang antara $0^{\circ}56'12''$ - $1^{\circ}28'17''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}56'10''$ - $101^{\circ}43'26''$ Bujur Timur. Ibukota dari Kecamatan Mandau adalah Kelurahan Air Jamban. Kecamatan Mandau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu dan Kota Dumai
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu.

Secara geografis luas wilayah Kecamatan Mandau sebesar $912,47 \text{ km}^2$. Di Kecamatan Mandau wilayah administrasi yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Bumbung yang luasnya 104 km^2 atau 11,40% dari luas Kecamatan Mandau secara keseluruhan. Sedangkan daerah yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Batang Serosa, Desa Balik Alam dan Kelurahan Duri Timur dengan luas wilayah sebesar 6 km^2 atau hanya 0,66% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Mandau.

Secara geografis seluruh desa ataupun kelurahan di Kecamatan Mandau merupakan daerah dataran. Hal ini dikarenakan oleh Kecamatan Mandau yang tidak berbatasan langsung dengan garis pantai. Begitu juga jika dilihat berdasarkan topografinya seluruh desa ataupun kelurahan yang ada di Kecamatan Mandau berbentuk datar. Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota Kecamatan Mandau adalah Desa Pamesi dengan jarak lurus sejauh 53 km kemudian diikuti oleh Desa Bathin Sobanga dan Bumbung yang masing-masing memiliki jarak lurus sejauh 43 km dan 41 km dari ibukota Kecamatan Mandau. Sedangkan yang memiliki jarak terdekat tentu saja Kelurahan Air Jamban yang merupakan ibukota dari Kecamatan Mandau.

1. Pemerintahan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Camat Kecamatan Mandau, tercatat pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan/Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Kemudian Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain : Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui. Suku asli di Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu.

Di Kecamatan Mandau jumlah RT mencapai 902 unit dan RW sebanyak 203 unit dimana jumlah RT terbanyak terdapat di ibukota kecamatan yakni Kelurahan Air Jamban sebanyak 122 RT dan jumlah RT paling sedikit terdapat di Kelurahan Bathin Sobanga yakni sebanyak 15 RT, begitu pula dengan jumlah RW terbanyak juga terdapat di Kelurahan Air Jamban yaitu sebanyak 23 RW dan yang paling sedikit terdapat di Desa Bathin Betuah dan Bathin Sobanga yang masing-masing berjumlah 4 RW.

2. Penduduk

Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli (tertua). terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 937,47 Km. terdiri dari 15 desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229.989 jiwa, keadaan bulan September 2011. adapun potensi daerah yaitu pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kepala sawit), perikanan darat dan industri makro dan mikro, perdagangan, jasa.

3. Kesehatan

Berdasarkan data dari UPTD Kesehatan Kecamatan Mandau pada tahun 2018 terdapat 5 Rumah Sakit di Kecamatan Mandau yang terletak di Kelurahan Gajah Sakti, Duri Timur, Air Jamban dan Pematang Pudu. Sementara praktek bidan hampir terdapat di masing-masing desa ataupun kelurahan kecuali Desa Bathin Batuah, Air Kulim dan Buah Manis. Jumlah tenaga medis yang tercatat pada tahun 2018 di Kecamatan Mandau sebanyak 54 orang dokter umum dan 8

orang dokter spesialis. Dokter umum hampir tersebar di setiap desa maupun kelurahan di Kecamatan Mandau kecuali di Desa Bathin Betuah, Boncang Mahang, Pematang Obo dan Pamesi.

4. Sosial

Pada tahun 2017 di Kecamatan Mandau terdapat sebanyak 222 masjid, 218 langgar/surau/mushala, 99 gereja protestan/katholik dan 2 wihara/klenteng, sedangkan tidak terdapat pura di Kecamatan Mandau. Setiap desa maupun kelurahan di Kecamatan Mandau memiliki masjid an langgar/surau/mushala, sedangkan wihara/klenteng hanya terdapat di Kelurahan Gajah Sakti dan Air Jamban.

5. Perekonomian

Industri memegang peranan penting dalam perekonomian kemasyarakatan di Kecamatan Mandau. Angka yang tercatat oeh dinas terkait menyebutkan terdapat sebanyak dua industri besar dan 5 industri sedang beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau. Sedangkan untuk industri kecil berjumlah 96 unit dan industri mikro sebanyak 233 unit selama kurun waktu 2018.

Selain industri, perdagangan juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar propinsi dan antar kabupaten, Kecamatan Mandau memiliki sarana perdagangan dan akomodasi yang terbilang memiliki jumlah yang banyak. Koperasi sebagai dasar perekonomian Indonesia juga berkembang cukup pesat di Kecamatan Mandau dimana tercatat sebanyak 9 unit KUD dan 88 unit koperasi non KUD yang

tersebar di seluruh desa ataupun kelurahan di Kecamatan Mandau dengan jumlah anggota koperasi mencapai 2.391 orang.

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Unit Pelaksana Tugas Dinas Sosial Kecamatan Mandau

Pentingnya pengorganisasian suatu unit kerja diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan rencana dan program kerja. Oleh karena itu pengorganisasian kerja merupakan pengaturan dan pembagian kerja yang ada pada organisasi itu, dimana dengan adanya pembagian kerja akan memudahkan pelaksanaan pertanggung jawaban atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk mengetahui tugas, fungsi, kedudukan serta tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing orang pada organisasi, perlu dibuat suatu susunan yang jelas tentang pembagian kerja dan kedudukan.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerja sama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tata tertib, penyusunan yang logis dan hubungan yang serasi. Jadi dalam struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Dinan Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Sosial
- b. Sekretaris Dinas Sosial
- c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
- f. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2020

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial
2. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial

3. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Unit Pelaksana Tugas Dinas Sosial Kecamatan

Mandau terdiri dari:

- a. Kepala UPTD Sosial
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pelayanan dan Pengendalian Masyarakat
 1. Sub Bidang Pelayanan
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
- d. Bidang Pengembangan
 1. Sub Bidang Survei Pengelolaan Data Sistem Informasi
 2. Sub Bagian Pengembangan
- e. Bidang Rehabilitasi
 1. Sub Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 2. Sub Keterampilan dan Potensi Diri

Gambar IV.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Dinas Sosial Kecamatan Mandau

Sumber : UPT Dinas Sosial Kecamatan Mandau 2020

D. Sumber Daya Organisasi

Dalam menyelenggarakan fungsinya Unit Pelaksana Tugas Dinas Sosial Kecamatan Mandau diperlukannya pegawai/aparat yang dapat melayani masyarakat dari semua bidang. Keadaan para pegawai pada Unit Pelaksana Tugas

Dinas Sosial Kecamatan Mandau perlu untuk diketahui karena pegawai merupakan hal yang pokok dalam sebuah organisasi, dimana pegawai adalah orang-orang yang akan menentukan apakah tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban oleh suatu instansi akan dapat terlaksana dan terwujud seperti apa yang diharapkan.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka diperlukan personil yang cukup dan memiliki SDM yang tinggi. Jumlah pegawai Unit Pelaksana Tugas Dinas Sosial Kecamatan Mandau adalah sebanyak 38 orang. Pegawai-pegawai tersebut direkrut dari Dinas/Instansi yang terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga telah berpengalaman dan ahli dibidang yang akan ditangani. Adapun kategori pegawai menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata II	1 Orang	02.63
2	Strata I	20 Orang	52.63
3	Diploma III	6 Orang	15.78
4	SLTA	10 Orang	26.31
5	SLTP	1 Orang	02.63
	Jumlah	38 Orang	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dengan dukungan 38 pegawai yang ada di Unit Pelaksana Tugas Dinas Sosial Kecamatan Mandau diharapkan dapat mencukupi dan memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga

dan aparatur pemerintahan serta masyarakat. Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan atau kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Kemampuan atau kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus menerus terhadap kondisi-kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja yang baik untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, identitas seorang narasumber yang dalam hal ini adalah informan penelitian sangat dibutuhkan sebagai sebuah pertanggung jawaban keabsahan penelitian yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu upaya meyakinkan pembaca hasil penelitian tersebut dalam hal bahwa penelitian yang dilakukan tersebut merupakan sebuah penelitian yang kredibel dan dapat di pertanggungjawabkan. Tahap awal dari uraian pembahasan BAB V ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari pada responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagi informasi penelitian yang diberikan para responden.

Dalam penelitian ini peneliti akan coba menjelaskan identitas informan penelitian. Ada beberapa hal – hal yang penting menurut peneliti untuk dijelaskan dalam hasil penelitian ini, diantaranya adalah terkait dengan Jabatan informan, Jenis Kelamin Informan, Usia Informan, Pendidikan Informan dan alamat informan.

1. Jabatan Informan

Jabatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu Jabatan juga dapat berpengaruh pada tanggung jawab kerja. Semakin tinggi jabatan seseorang

maka akan mempengaruhi beban dan tanggung jawab kerjanya, Adapun gambaran Jabatan yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.1 : Gambaran Responden

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Kepala UPTD Meri Haryani, AMK	1
2	Anak Jalanan	10
3	RT/RW dan Tokoh Masyarakat/Agama	50
Jumlah		61

Sumber : Data olahan Peneliti, 2020

2. Jenis Kelamin Informan

Jenis Kelamin bukanlah sesuatu yang mutlak dalam penelitian, namun tentu saja Jenis Kelamin dari seorang informan menjadi faktor yang juga berpengaruh dalam hal hasil penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini peneliti sampaikan karena kecenderungan yang sering terjadi dalam hal persepsi gender memperlihatkan bahwa pandangan seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki kecenderungan yang bertolak belakang. Kecenderungan yang bertolak belakang tersebut kemudian tidak bisa kita lepaskan dari kodrat yang telah Tuhan tetapkan kepada setiap hamba-Nya.

Selanjutnya, dalam penelitian ini setelah melakukan penelitian langsung kelapangan, sesuai dengan informan yang telah ditetapkan tidak Artinya adalah semua informan pada penelitian ini yang berjumlah 62 orang diantaranya 38 orang laki-laki dan 24 orang perempuan.

3. Usia Informan

Usia Informan dalam sebuah penelitian merupakan sebuah hal yang penting untuk ditampilkan walaupun hal ini bukan sesuatu yang menjadi faktor penentu dalam sebuah hasil penelitian. Namun demikian, Usia Informan penelitian menjadi sebuah yang cukup penting dikarenakan usia dapat menjadi sesuatu faktor pendukung dalam kecenderungan kredibilitas hasil penelitian.

Dalam sebuah penelitian, usia informan cukup mempengaruhi dari sebuah hasil penelitian. Hal ini dikarenakan pengalaman seorang informan yang kecenderungannya dipengaruhi oleh usianya akan membuat informan tersebut memberikan jawaban sesuai dengan pengalamannya pula.

Selanjutnya, dalam penelitian ini, kecenderungan usia informannya di dominasi oleh masyarakat parubaya yang berusia sekitar 31 sampai 40 tahun. Untuk dapat melihat lebih jelasnya, maka peneliti menjelaskan sebagaimana berikut ini :

- a. Usia 17 tahun sampai dengan usia 35 tahun berjumlah 41 orang;
- b. Usia 35 tahun sampai dengan usia 50 tahun berjumlah 19 orang; dan
- c. Usia 51 tahun keatas berjumlah 2 orang.

4. Pendidikan Informan

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa kita tepikan dalam sebuah penelitian. Apalagi kita berbicara tentang narasumber dalam sebuah penelitian, maka pendidikan seorang informan sangat penting untuk ditampilkan dalam sebuah hasil penelitian. Karena hal ini tentunya akan cukup mempengaruhi

jawaban dari seorang informan tersebut. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan berbeda pandangannya dengan seseorang yang pendidikannya lebih rendah. Hal ini peneliti sampaikan karena kecenderungan seorang yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki pengetahuan atau ilmu yang lebih banyak atau lebih tinggi pula. Oleh karena itu, maka seseorang yang pendidikannya lebih tinggi, kecenderungannya akan mampu memberikan jawaban penelitian yang lebih kredibel daripada informan yang lebih rendah pendidikannya (walaupun hal ini tidak mutlak).

Selanjutnya, dalam penelitian ini, pendidikan informan cenderung didominasi oleh pendidikan lanjutan atas atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Untuk dapat melihat lebih jelasnya, akan peneliti jelaskan seperti berikut ini :

- a. Tidak Sekolah 12 orang
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 38 orang
- c. Akademi/Diploma 3 ada 2 orang
- d. Starata Satu (S.1) 8 orang.
- e. Pasca Sarjana ada 2 orang.

B. Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)

Dalam penelitian ini, penulis telah melaksanakan penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden yang berjumlah 62 orang di lokasi penelitian dalam rentang waktu dari tanggal 5 Februari 2020.

Pertanyaan dalam kuisisioner penelitian ini dibagi menjadi 6 (enam) kategori yaitu dalam hal :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

Untuk melihat bagaimana hasil penelitian terkait dengan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau) akan peneliti jelaskan secara kualitatif sebagaimana dengan metode penelitian yang telah peneliti uraikan di bab sebelumnya.

1. Efektifitas

Membahas Efektifitas yang merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Melalui indikator ini yang menjadi ukuran adalah Bagaimana keefektifan kebijakan yang sudah pernah di buat dalam menurunkan jumlah anak jalanan dan Bagaimana keefektifan pemberian hak untuk anak jalanan dalam hal pendidikan dan keterampilan.

Maka untuk itu, dalam penelitian ini terkait dengan hal tersebut di atas peneliti membedakan pertanyaan penelitian menjadi dua kategori yaitu, *pertama*, keefektifan kebijakan yang sudah pernah di buat dalam menurunkan jumlah anak jalanan. *Kedua*, untuk kategori dan Bagaimana keefektifan pemberian hak untuk

anak jalanan dalam hal pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya, untuk dapat melihat bagaimana persebaran atau distribusi tanggapan atau jawaban maka peneliti maka dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.2 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Efektifitas

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bagaimana Keefektifan kebijakan yang sudah pernah di buat dalam menurunkan jumlah anak jalanan	48	2	11	61
2.	Bagaimana keefektifan pemberian hak untuk anak jalanan dalam hal pendidikan dan keterampilan	39	15	7	62
Jumlah		87	17	18	122
Rata-rata		43,5	8,5	9	61
Persentase		71 %	14 %	15%	100%

Sumber : Data olahan Peneliti, 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Indikator Efektifitas dalam hal ini adalah Keefektifan kebijakan yang sudah pernah di buat dalam menurunkan jumlah anak jalanan memiliki respons yang cukup variatif. Namun berdasarkan statistik pada tabel tersebut, kategori penilaian “Baik” menjadi kategori paling dominan dengan persentase yaitu 71 % responden memberikan jawaban pada kategori “Baik” ini. Sedangkan, untuk dua kategori lainnya yaitu kategori “Cukup Baik” mendapatkan skor penilaian dengan persentase 14% dan kategori “Kurang Baik” 15%.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Dinas Sosial Kecamatan Mandau di kantornya pada hari Senin, 20 Januari 2020 Pukul 10.00-11.00 wib, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa Kebijakan yang di buat semuanya di peruntukan untuk anak jalanan dan bertujuan untuk mensejahterakan dan menekankan angka serta jumlah mereka seperti yang di terangkan kepada peneliti sebagai berikut;

“Tentu saja ini sudah kami siapkan sedemikian rupa demi memperoleh hasil seperti yang kita inginkan bersama karena bagaimanapun mereka juga menjadi tanggung jawab kita. Keberadaan anak jalanan sering di anggap masalah bagi sebagian orang dan masyarakat sekitar mereka beraktifitas ”

Selanjutnya ketika di tanyakan kepada salah satu narasumber anak jalanan yang memilih jawaban Kurang baik terhadap Keefektifan program untuk anak jalanan di paparkan oleh narasumber yang bernama Zulfahmi 19 Tahun bahwa:

“Program yang di berikan ketika kami di tangkap biasanya Cuma di beri pengarahan dan ceramah saja lalu besoknya di lepas kembali dan biasanya kami di tangkapin bukan di ajarin buat apa-apa walau pernah senior saya yang di tangkap lalu di beri pelatihan katanya”

Dari 100% akumulasi total persentase jawaban responden juga di dapat 15% yang menjawab Tidak Baik yang di pilih oleh responden dan berikut sedikit kutipan wawancara langsung peneliti dan Bapak Sugiatno 45 Tahun dimana beliau memaparkan kepada peneliti bahwa beliau melihat belum efektif dari kebijakan yang di buat diman menurut beliau tujuan dari kebijakan hanya untuk membersihkan kota dari mereka yang di anggap sampah masyarakat atau mengotori kota bukian untuk membuat mereka memiliki kehidupan yang lebih baik karena menurut beliau kebanyakan yang menjadi anak jalanan adalah anak yang tidak memiliki keluarga yang ekonominya bagus dan keahlian dari anak-anak untuk bekerja normal itu tidak ada. Ditambah lagi dengan tidak bersekolahnya mereka menjadikannya susah untuk bersaing di dunia kerja.

Dari hasil Observasi yang peneliti lakukan di lapangan Memang pada dasarnya juga jelas semua hal yang menyangkut anak jalanan sering di pautkan

dengan masalah kriminal dan keresahan masyarakat terhadap kehadiran mereka. biasanya memang butuh waktu yang panjang sehingga keberadaan mereka bisa di tekan, serta setiap bagian Pemerintahan yang berperan bisa berkoordinasi dengan baik demi terwujudnya sebuah masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan bermanfaat untuk masyarakat. Untuk pelatihan mungkin kedepannya bentuk dari pelatihannya harus lebih modern dan lebih mengarah pada kemampuan membuat barang jadi yang bernilai ekonomis tinggi dan dapat menjadi pembuka jalan untuk anak jalanan membuat usaha sendiri.

Selanjutnya ketika di tanyakan perihal Bagaimana keefektifan pemberian hak untuk anak jalanan dalam hal pendidikan dan keterampilan kepada Kepala UPTD Dinas Sosial Kecamatan Mandau mengatakan bahwa

“Pendidikan yang di berikan selalu berbentuk keterampilan yang diharapkan bisa bermanfaat oleh mereka di kemudian hari dan saya rasa sejauh ini cukup efektif karena kita bisa lihat ada beberapa anak jalanan yang beralih menjadi pengrajin atau keterampilan tangan yang mereka buat sangat luar biasa walau belum mendapatkan pasarnya, seperti ada beberapa anak jalanan aliran punk yang saya dengar sudah membuka sablon baju dan kedepannya yang seperti ini akan kita follow up kembali agar bisa berkesinambungan dan berlanjut serta jumlah anak jalanan yang berkembang maju seperti ini juga dapat bertambah”

Selanjutnya ketika di tanyakan hal yang sama kepada Narasumber yang kebetulan beralamat dekat dengan persimpangan atau lampu merah yaitu Bapak Hendriyadi 43 tahun menuturkan kepada peneliti bahwa:

“Menurut saya Pemberian pendidikan untuk anak jalanan ini harus di buat berkesinambungan kalau bisa seperti sekolah umum lainnya karena biasanya saya

melihat hari ini mereka di tanggap tapi 3 atau 4 hari kedepan mereka sudah kembali lagi ke jalanan, saya ngak sepenuhnya menyalahkan pemerintah terkait tetapi saya juga berpandangan bahwa di jalan ini adalah jalan hidup yang mereka pilih karena jika di telusuri banyak dari mereka yang sebenarnya memiliki orang tua yang cukup berada atau orang mampu tetapi karna satu atau dua hal membuat mereka lebih merasa nyaman hidup di jalanan. Nah itu makanya saya tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah jika anak-anak jalanan ini masih saja ngeyel ke jalanan dan tidak mau di rehabilitasi atau sebagainya”

Dari Observasi peneliti di lapangan juga menemukan hal yang sama karena menjadi anak jalanan bukan sepenuhnya mereka karena masalah sosial karena peneliti menemukan sebuah fakta bahwa ada anak jalanan yang peneliti kenal yang ternyata masih memiliki orang tua yang lengkap dan biwa di bilang tingkat ekonomi atas karena kebetulan orang tua si anak ini adalah karyawan di salah satu perusahaan di kecamatan Mandau dan peneliti menemukan bahwa memang dari pihak anak jalanan juga susah untuk di lakukan pelatihan karena mereka sendiri enggan mengikuti acara yang ada.

Secara keseluruhan tanggapan atau respons responden yang demikian itu merupakan menjadi sebuah gambaran bagi peneliti bahwa Indikator Efektifitas sudah bisa di nilai **“Baik”**.

2. Efisiensi

Dalam pembahasan Efisiensi disini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas umum maka hal – hal yang dapat dinilai menurut peneliti yaitu Bagaimana Efisiensi dari Bentuk Pemberdayaan Anak jalanan yang ada agar tidak mengganggu keamanan. Dan bagaimana efisiensi dari bentuk perlindungan masyarakat terhadap kriminal dari anak jalanan. Hal ini menurut peneliti merupakan item yang paling tepat diteliti

Maka untuk itu, dalam penelitian ini terkait dengan hal tersebut di atas peneliti membedakan pertanyaan penelitian menjadi dua kategori yaitu, *pertama*, Bagaimana Efisiensi dari Bentuk Pemberdayaan Anak jalanan yang ada agar tidak mengganggu keamanan. *Kedua*, Dan bagaimana efisiensi dari bentuk perlindungan masyarakat terhadap kriminal dari anak jalanan..

Selanjutnya, untuk dapat melihat bagaimana persebaran atau distribusi tanggapan responden maka dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3: Distribusi Tanggapan Responden Efisiensi

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bagaimana Efisiensi dari Bentuk Pemberdayaan Anak jalanan yang ada agar tidak mengganggu keamanan.	53	5	3	61
2.	Bagaimana efisiensi dari bentuk perlindungan masyarakat terhadap kriminal dari anak jalanan	51	7	3	61
Jumlah		104	12	6	122
Rata-rata		52	6	3	61
Persentase		85 %	10%	5%	100%

Sumber : Data olahan Peneliti, 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator Efesiensi dalam hal ini adalah Keefesienan kebijakan yang sudah pernah di buat dalam menurunkan jumlah anak jalanan memiliki respons yang cukup variatif. Namun berdasarkan statistik pada tabel tersebut, kategori penilaian “Baik” menjadi kategori paling dominan dengan persentase yaitu 85% responden memberikan jawaban pada kategori “Baik” ini. Sedangkan, untuk dua kategori lainnya yaitu kategori “Cukup Baik” mendapatkan skor penilaian dengan persentase 10% dan kategori “Kurang Baik” 5%.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Dinas Sosial Kecamatan Mandau di kantornya pada hari Senin, 20 Januari 2020 Pukul 10.00-11.00 wib, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa

“Bentuk dari Kebijakan pemberdayaan anak jalanan agar tidak menjadi pelaku kriminal dan mengganggu kehidupan sosial sejauh ini terus kami lakukan sekuat tenaga karena ini juga menjadi permasalahan yang harus benar-benar kami selesaikan”

Memang seharusnya ini menjadi sebuah kutian besar bagi pihak terkait bagaimana menjaga anak jalanan ini untuk tidak menjadi pelaku kriminal ataupun tindakan melanggar hukum lainnya. Selanjutnya Koordinasi memang sangat dibutuhkan ketika sebuah program harus terlaksana dengan baik.

Selanjutnya ketika di tanyakan perihal Keefesienan program yang di buat Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Dinas Sosial Kecamatan Mandau di kantornya pada hari Senin, 20 Januari 2020 Pukul 10.00-11.00 wib, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Sejauh ini cukup efisien karena untuk kasus kriminal yang terdata itu sangat sedikit berstatus anak jalanan tapi pengaduan kriminal kecil seperti

mengganggu dan usil itu pasti ada tapi dalam beberapa waktu ini belum ada kami menerima dan koordinasi dengan pihak berwajib tentang anak jalanan masih kami jalin komunikasi dengan baik”

Selanjutnya ketika ditanyakan hal yang sama kepada Elfita 45 Tahun sebagai masyarakat yang bermukim di Simpang Telkom Jalan Hangtuh yang merupakan salah satu titik kumpul beberapa anak jalanan yang bisa kita lihat sendiri biasanya ada 3 sampai 5 orang anak jalanan di sini. Ketika di tanyakan tentang keefesienan program pemerintah tentang menekan angka anak jalanan ini beliau memberikan tanggapan “*Kurang Baik*” dan beliau memaparkan alasannya kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya melihat program Pemerintah terkait dalam hal anak jalanan ini masih harus ada peubahan yang besar dan mendasar baik dari segala segi, ini menurut saya karena nyatanya mereka masih saja tetap ke jalan untuk mengamen dan meminta minta walaupun sudah di berikan pelatihan ataupun di rahabilitasi pemerintah. Nah dari hal ini saya berpikir ini harus ada perubahan besar karena kita tau anak jalanan ini sejak dahulu kala sudah ada dan nyatanya sekarang di zaman modren ini masih saja tetap ada padahla kita tau bahwa pendaptan daerah kita ini yang termasuk tinggi dan luar biasa katanya”

Dari pemaparan Elfita ini bisa kita simpulkan sepertinya beliau sudah sedikit geram dengan keberadaan anak jalanan yang tidak bisa di atasi oleh pemerintah terkait dan mungkin saja karena beliau yang hampir setiap hari berinteraksi dengan anak jalanan menjadikan beliau tahu betul keadaan anak jalanan di daerahnya.

Hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan dan wawancara dengan responden yang ada menghasilkan kesimpulan bahwa penilaian responden dengan kategori “Baik” mendominasi penilaian tanggapan atau respons dari responden

yang demikian itu merupakan implikasi dari lapangan. Ini menjadi sebuah gambaran bagi peneliti bahwa proses yang di jalankan sudah **“Baik”**.

3. Kecukupan

Menurut peneliti, yang menjadi Indikator Kecukupan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan yang di buat dan dilaksanakan mencapai hasil yang cukup untuk berbagai pihak yang terlibat terutama untuk anak jalanan bagaimana nantinya mereka di jalanan.

Dalam penelitian ini terkait dengan hal tersebut di atas peneliti membedakan pertanyaan penelitian menjadi dua kategori yaitu, *pertama*, Bagaimana kecukupan jaminan sosial terhadap anak jalanan yang ada saat ini. *Kedua* Apakah keputusan yang di buat sudah menyentuh seluruh anak jalanan.

Selanjutnya, untuk dapat melihat bagaimana persebaran atau distribusi tanggapan maka dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Kecukupan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bagaimana kecukupan jaminan sosial terhadap anak jalanan yang ada saat ini	42	18	1	61
2.	Apakah keputusan yang di buat sudah menyentuh seluruh anak jalanan.	46	14	1	62
Jumlah		88	32	2	124
Rata-rata		44	16	1	61
Persentase		72 %	26 %	2%	100%

Sumber : Data olahan Peneliti, 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator Kecukupan memiliki respons yang cukup variatif. Namun berdasarkan statistik pada tabel tersebut, kategori penilaian “Baik” menjadi kategori paling dominan dengan persentase yaitu 72% responden memberikan jawaban pada kategori “Baik” ini. Sedangkan, untuk dua

kategori lainnya yaitu kategori “Cukup Baik” mendapatkan skor penilaian dengan persentase 26% dan kategori “Kurang Baik” 2%.

Data di atas didukung oleh beberapa responden yang memberikan alasan yang diantaranya adalah Selanjutnya ketika di tanyakan perihal Kecukupan dalam hal Jaminan Sosial untuk anak jalanan Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Dinas Sosial Kecamatan Mandau di kantornya pada hari Senin, 20 Januari 2020 Pukul 10.00-11.00 wib, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa;

“Jaminan Sosial untuk anak jalanan sejauh ini ada dan ya tetap kordinasi tetap kita jalankan dengan berbagai pihak karena itu juga tanggung jawab dari kami, kami juga terus bersinergi bagaimana anak jalanan juga bisa segera sejahtera”

Selanjutnya ketika di tanyakan kembali kepada Kepala UPTD Sosial Kecamatan Mandau pada beliau mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Menjamin anak jalanan untuk kesehatan dan pendidikan mereka bagian dari tugas kami tetapi kita bisa lihat sendiri terkadang mereka yang menolak itu semua dan enggan untuk kami didik ataupun sekedar di beri pelatihan”

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa UPTD Sosial harus lebih agresif dan lebih inovatif dalam berurusan dengan anak jalanan dan harus lebih aktif memberikan mereka pemahaman yang bisa merubabah pola pikir mereka.

Pada waktu yang sama dan tempat yang sama peneliti juga menanyakan perihal apakah sudah menyentuh semua anak jalanan dalam hal jaminan sosial Kepala UPTD Sosial Kecamatan Mandau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Saya rasa sudah semua dari mereka mengetahui tentang adanya jaminan sosial untuk mereka tetapi tentu ada prosedur untuk mereka yang bahkan untuk kartu identitas diri saja mereka tidak punya”

Ini juga sebuah temuan dalam penelitian ini bahwasanya sangat banyak anak jalanan yang sama sekali tidak memiliki identitas jelas seperti Kartu Keluarga, KTP ataupun tanda pengenal lainnya yang di perkuat dengan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa dari sejumlah anak jalanan yang peneliti temui di jalanan hampir semuanya tidak memiliki identitas diri seperti Kartu Tanda Pengenal yang seharusnya menjadi kewajiban warga negara berusia 17 Tahun keatas.

Memang untuk saat ini sangat dibutuhkan Inovasi ataupun program kerja baru sehingga ada hal baru yang akan membuat perubahan menyeluruh dalam penanganan anak jalanan tetapi dari hasil yang peneliti dapat melalui Kuisisioner yang di sebar kepada responden yang ada di dapat untuk indikator Kecukupan mendapatkan nilai **“Baik”**

4. Perataan

Dalam pembahasan Perataan disini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program yang ada apakah sudah menyentuh semua anak jalanan dan apakah sudah merata dan menyeluruh merasakan manfaatnya. dalam penelitian ini terkait dengan hal tersebut di atas peneliti membedakan pertanyaan penelitian menjadi dua kategori yaitu, *pertama*, . Bagaimanakah Respon dari pihak terkait dalam menindak lanjuti kriminalitas anak jalanan? *Kedua*, Bagaimana respon dinas terkait terhadap peningkatan jumlah anak jalanan.

Selanjutnya, untuk dapat melihat bagaimana persebaran atau distribusi tanggapan responden maka dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Perataan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bagaimanakah Respon dari pihak terkait dalam menindak lanjuti kriminalitas anak jalanan	53	5	3	61
2.	Bagaimana respon dinas terkait terhadap peningkatan jumlah anak jalanan.	51	7	3	61
Jumlah		104	12	6	122
Rata-rata		52	6	3	61
Persentase		85%	10%	5%	100%

Sumber : Data olahan Peneliti, 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator Perataan dalam hal ini adalah Respon dari pihak terkait dalam menindak lanjuti kriminalitas anak jalanan memiliki respons yang cukup variatif. Namun berdasarkan statistik pada tabel tersebut, kategori penilaian “Baik” menjadi kategori paling dominan dengan persentase yaitu 85% responden memberikan jawaban pada kategori “Baik” ini. Sedangkan, untuk dua kategori lainnya yaitu kategori “Cukup Baik” mendapatkan skor penilaian dengan persentase 10 % dan kategori “Tidak Baik” 5%.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di kantornya pada hari Senin, 20 Januari 2020 Pukul 10.00-11.00 wib, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa

“Ketika kita bicara Kriminalitas tentu saja yang paling dominan disini adalah Kepolisian sebagaimana masyarakat ketika terganggu ataupun ada tindakan kriminal pasti melapor ke Polsek Mandau dan begitu juga dengan kasus yang di lakukan anak jalanan dan untuk saat ini respon dari pihak kepolisian sangat baik karena juga beberapa kali kita bersinergi bersama-sama mengedukasi mereka beberapa waktu yang lalu”

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan di dapati bahwasanya kita tidak bisa memisahkan antara anak jalanan dan kriminalitas baik di daerah manapun karena sejatinya mereka anak jalanan sangat dekat dengan tindak kriminal baik narkoba ataupun pencurian tetapi ini seharusnya menjadi satu titik tumpu alasan untuk bisa mengusahakan agar mereka tidak terjerumus dalam hal tersebut, karena kita tahu bahwa jika sudah lekat dengan narkoba itu akan berkembang ke tindak kriminal lainnya seperti tindak pencurian yang akhirnya akan semakin memperumit kehidupan anak jalanan dan menghancurkan masa depannya.

Selanjutnya ketika di tanyakan kepada Badrial 43 Tahun sebagai masyarakat yang sering berada di area lampu merah simpang telkom Duri dan kebetulan sejak 3 tahun yang lalu menjadi tempat mereka menunggu penumpang sebagai ojek pangkalan bahwa penindakan kriminalitas anak jalanan cukup baik di lakukan oleh pihak kepolisian sejauh ini sebagaimana beliau paparkan kepada peneliti:

“Saya pernah melihat disini beberapa waktu yang lalu ketika ada kasus pencurian di daerah Jln Aman dan saya tidak tahu persis lokasinya dan teridentifikasi itu di lakukan oleh anak jalanan yang kebetulan di bawah umur dan akhirnya yang saya tahu si anak akhirnya di rehabilitasi dan bahkan saya mendengar si anak akhirnya sekolah di sebuah pondok pesantren dan tidak lagi di jalan. Saya tidak tahu apakah itu memang program pemerintah atau memang ada yang membiayai sekolahnya ataupun itu di biyai orang tua si anak”

Sejalan dengan pemaparan Badrial di atas ketika di tanyakan hal yang sama kepada Ramdani hasan 19 Tahun yang kebetulan anak jalanan yang peneliti

temui di Simpang Pokok Jengkol yang menjadi salah satu titik yang cukup banyak anak jalanan yang berada di sini mengatakan bahwa penindakan atas mereka itu sama saja dengan pelaku kriminal lainnya ungkapnya:

“Kami jika melakukan tindak kriminal pasti di tindak sebagaimana penindakan terhadap pelaku kriminal lainnya dan mungkin juga bisa jadi kami lebih di azab ketika kami tertangkap karena kami di anggap sebagai sampahnya masyarakat dan kami di anggap sangat mengganggu masyarakat padahal keberadaan kami di jalanan cuma ingin hidup dan makan dengan cara kami, soal diskriminasi saya dan kawan-kawan sudah jadi hal biasa. Harusnya begini, jangan pandang orang dari tampilannya yang nyatanya manusia sekarang itu menilai manusia dari tampilannya bukan sikapnya. Bagi kami mau di anggap apa juga terserah karena kami tidak buat apa-apa saja pandangan orang sudah jelek ke kami karena kami kotor dan menakutkan”

Senada dengan yang di ungkapkan Ramdani di atas kepada peneliti M Ridho 23 Tahun mengutarakan kepada peneliti bahwa:

“Di negara kita kan punya hukum ya kak, jadi ketika itu kami melakukan kriminal sudah pasti di tindak kak, tetapi terkadang ada beberapa kali saya lihat ketika yang berbuat kriminal itu dari kalangan kami anak jalanan ataupun kawan kawan dari anak punk itu penindaknannya sangat cepat dan mereka penegak hukum agak agresif kak beda dengan jika mereka yang berdasi yang melakukan kriminal saya lihat. Dan saya sadar kita hidup di indonesia yang bentuk hukumnya tajam kebawah tapi tak bernyali ke atas”

Dari pemaparan anak jalanan berikut bisa kita maknai bahwasanya Respon dari pihak terkait dalam menindak lanjuti kriminalitas anak jalanan sudah berjalan dengan **Baik** di buktikan dengan beberapa kali ada penindakan dan hasil dari kumpulan Kuisisioner yang peneliti sebar juga menunjukkan hasil yang sudah **Baik**.

5. Responsivitas

Dalam pembahasan Responsivitas disini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon atas perubahan-perubahan dinamika di lapangan. Dalam penelitian ini terkait dengan hal tersebut di atas peneliti membedakan pertanyaan penelitian menjadi dua kategori yaitu, *pertama*, Bagaimana ketepatan program yang di buat sejauh ini? *Kedua*, .Bagaimana program yang sudah di jalankan bisa menumbuhkan sifat anak jalanan yang bisa mandiri dan kreatif bagaimana pengaruh predikat kecamatan terbaik.

Selanjutnya, untuk dapat melihat bagaimana persebaran atau distribusi tanggapan maka dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Responsivitas

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bagaimana ketepatan program yang di buat sejauh ini?	42	18	1	61
2.	Bagaimana program yang sudah di jalankan bisa menumbuhkan sifat anak jalanan yang bisa mandiri dan kreatif?	46	14	1	61
Jumlah		88	32	2	122
Rata-rata		44	16	1	61
Persentase		72 %	26 %	2 %	100%

Sumber : Data olahan Peneliti, 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator Responsifitas memiliki respons yang cukup variatif. Namun berdasarkan statistik pada tabel tersebut, kategori penilaian “Baik” menjadi kategori paling dominan dengan persentase yaitu 72% responden memberikan jawaban pada kategori “Baik” ini. Sedangkan, untuk dua

kategori lainnya yaitu kategori “Cukup Baik” mendapatkan skor penilaian dengan persentase 26 % dan kategori “Kurang Baik” 2%.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Dinas Sosial Kecamatan Mandau di kantornya pada hari Senin, 20 Januari 2020 Pukul 10.00-11.00 wib, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa ketepatan program yang di buat sejauh ini belum sepenuhnya baik dan beliau memilih pilihan di kuisioner yang peneliti berikan dan memberikan penilaian **Kurang Baik** dan berikut penjelasannya:

“Sejauh ini menurut hemat saya program yang kami buat dan sediakan itu sudah sangat bervariasi dan berbagai inivasi selalu kami berikan tetapi jujur saja saya sendiri merasa masih gagal menghadirkan program yang tepat untuk mereka karena bagi saya mereka terus saja merasa tidak senang dan tidak puas dengan program0program pelatihan yang kami berikan di buktikan dengan volume kedatangan mereka dan niat mereka untuk belajar yang sangat sedikit”

Satu hal yang membuat peneliti cukup terkejut karena pemaparan beliau adalah kejujuran beliau mengatakan ketidak berhasilan beliau dalam menghadirkan program yang dapat menarik minat dari anak jalanan untuk ikut andil dalam program yang di tujukan kepada mereka, selanjutnya ketika di tanyakan perihal ketepatan program yang di buat sejauh ini kepada anak jalanan yang bernama Derri Saputra 19 Tahun yang biasanya mengamen di Simpang Telkom dan dia memaparkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Untuk pelatihan yang di buat sering saya mendengar tapi saya dan kawan-kawan jarang hadir atau mangkir karena menurut kami itu tidak ada gunanya karena stelah pelatihan kami juga harus ke jalanan lagi, adapun pelatihan nanti tentu pelaksanaannya kami perlu dana dan modal sementara kami saja makan

susah. Ada pernah pelatihan penyablonan dan di harapkan kami bisa berdikari untuk bisa membuat sablon sendiri tapi kan kita tau bahwa sablon itu tidak murah dan perlu modal, sementara kami untuk makan aja susah”

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dan diperkuat dengan pemaparan dari beberapa informan di atas bisa kita simpulkan bahwasanya permasalahan yang terjadi di sini adalah bagaimana pemberdayaan mereka setelah mendapatkan program pelatihan. Seharusnya setelah di berikan pelatihan tentunya tidak bisa langsung lepas begitu saja tetapi harus di awasi dan di bantu untuk mereka berkembang dan mampu berjalan sendiri setelahnya. Dan peneliti disini melihat bahwasannya tindakan setelah pelatihan yang kurang karena seharusnya setelah pelatihan lalu di buat kan mereka badan usaha atau di bantu mereka mencari yang mau berinvestasi dan memberikan modal di bawah naungan Pemerintah Daerah.

Tetapi sejauh ini karena begitu banyak variasi program pelatihan yang di buat dapat menutupi kekurangan tersebut dan akhirnya untuk indikator Responsivitas responden memberikan penilaian **“Baik”**.

6. Ketepatan

Indikator Ketepatan adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Dalam pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan Program yang ada, dengan hal tersebut peneliti membedakan pertanyaan penelitian menjadi dua kategori yaitu, *pertama*, bagaimana Terciptanya Perkembangan Kemampuan anak. *Kedua*, Pencapaian dari rehabilitasi yang sudah pernah dilakukan

Selanjutnya, untuk dapat melihat bagaimana persebaran atau distribusi tanggapan Responden maka dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Ketepatan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Terciptanya Perkembangan Kemampuan anak	48	2	11	61
2.	Pencapaian dari rehabilitasi yang sudah pernah dilakukan	39	15	7	61
Jumlah		87	17	18	122
Rata-rata		43,5	8,5	9	61
Persentase		71 %	14 %	15%	100%

Sumber : Data olahan Peneliti, 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Indikator Ketepatan dalam hal ini adalah Terciptanya Perkembangan Kemampuan anak memiliki respons yang cukup variatif. Namun berdasarkan statistik pada tabel tersebut, kategori penilaian “Baik” menjadi kategori paling dominan dengan persentase yaitu 71 % responden memberikan jawaban pada kategori “Baik” ini. Sedangkan, untuk dua kategori lainnya yaitu kategori “Cukup Baik” mendapatkan skor penilaian dengan persentase 14% dan kategori “Tidak Baik” 15%.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Dinas Sosial Kecamatan Mandau di kantornya pada hari Senin, 20 Januari 2020 Pukul 10.00-11.00 wib, beliau mengatakan kepada peneliti bahwa Terciptanya Perkembangan Kemampuan anak seperti yang di terangkan kepada peneliti sebagai berikut;

“Tujuan utama dari program pemberdayaan dan pembinaan yang kita buat selalu bertujuan agar mereka memiliki kemampuan dan keahlian yang membuat mereka mampu bersaing di dunia kerja, membuat mereka percaya diri untuk tidak kembali ke jalanan dan membuat mereka memiliki penghasilan dan titik paling

tinggi dalam harapan kami adalah mereka memiliki usaha mandiri yang mereka olah sendiri yang akhirnya membuat mereka tak kembali ke jalanan”

Selanjutnya ketika di tanyakan kepada Sandi 23 Tahun Pengamen yang kebetulan melintasi tempat dari peneliti beristirahat di Jalan Sudirman di sebuah rumah makan dan beliau memaparkan:

“Terciptanya Perkembangan Kemampuan anak bisa di dapat dengan pelatihan yang sesuai dengan yang di inginkannya dan di minatnya tetapi sejauh ini yang saya lihat pelatihan untuk anak jalanan itu menyesuaikan dari selera mereka yang membuat pelatihan, sebenarnya sejauh ini bagus jika ada pelatihan tetapi saran saya coba buat pelatihan yang dapat menarik minat dan bakat kami. Maksudnya satu hal yang benar-benar membuat kami tertarik dan itu hal baru”

Hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan dan wawancara dengan responden yang ada menghasilkan kesimpulan bahwa penilaian responden dengan kategori “Baik” mendominasi penilaian tanggapan atau respons dari responden yang demikian itu merupakan implikasi dari lapangan. Ini menjadi sebuah gambaran bagi peneliti bahwa proses yang di jalankan sudah **“Baik”**.

Dari keseluruhan tanggapan responden terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau) dapat di simpulkan pada tabel Rekapitulasi di bawah ini :

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)

NO	Indikator	Rekapitulasi Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	43,5 (71%)	8,5 (14%)	9 (15%)	61
2	Efesiensi	52 (85%)	6 (10%)	3 (5%)	61
3	Kecukupan	44 (72%)	16 (26%)	1 (2%)	61
4	Perataan	52 (85%)	6 (10%)	3 (5%)	61
5	Responsivitas	44 (72%)	16 (26%)	1 (2%)	61
6	Ketetapan	43,5 (71%)	8,5 (14%)	9 (15%)	61
Jumlah		279	61	26	366
Rata-rata		47	10	4	61
Persentase		76%	17%	7%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari analisa pada tabel di atas ini dapat di simpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial di Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kecamatan Mandau berdasarkan Persentase tertinggi dapat di kategorikan “ BAIK” . yang memperoleh rata rata tanggapan responden 47 orang atau 76% dan rata rata Responden setiap Variabel mengatakan Baik dalam setiap Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kecamatan Mandau.

C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Hadapi Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Hal Ini UPTD Sosial Kecamatan Mandau Dalam Menekan Angka Anak Jalanan Di Kabupaten Bengkalis Terkhusus Kecamatan Mandau

Dalam penelitian ini selain hasil daripada penelitian, yang menjadi tujuan lainnya adalah diketahui faktor-faktor kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menekan angka anak jalanan di Kabupaten Bengkalis terkhusus Kecamatan Mandau, Adapun faktor faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurang tepatnya bentuk program pelatihan yang di berikan selama ini.
2. Masih banyak anak jalanan yang tidak mengikuti pelatihan yang bertujuan agar mereka mampu bersaing di dunia kerja.
3. Anak jalana yang selalu berpindah-pindah juga menjadi hambatan untuk UPTD Sosial dalam mengawasi mereka.
4. Pelaksanaan Program seharusnya lebih di fokuskan menghasilkan anak jalanan yang memiliki usaha sendiri.
5. Penghambat lainnya adalah pengawasan setelah di berikan program pelatihan seharusnya lebih di tingkatkan dan di bantu untuk anak jalanan bisa menciptakan usaha mandiri.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan **Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Kecamatan Mandau)** yang peneliti lakukan maka dapat dilihat antara lain :

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menekan angka anak jalanan di Kabupaten Bengkalis terkhusus Kecamatan Mandau, peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang di lihat dari Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketetapan berada pada kategori “BAIK” yang peneliti lakukan di lapangan. Hal ini dapat di lihat dari rata-rata tanggapan responden yaitu sebanyak 47 orang atau dengan Persentase 76 %. Baiknya pelaksanaan fungsi UPTD Sosial di sebutkan diatas menjadi jawaban pertanyaan pada penelitian ini yaitu Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menekan angka anak jalanan di Kabupaten Bengkalis terkhusus Kecamatan Mandau.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat di simpulkan bahwasanya terdapat beberapa permasalahan yang peneliti temukan di lapangan seperti pada dasarnya juga jelas semua hal yang menyangkut anak jalanan sering di pautkan dengan masalah kriminal dan keresahan masyarakat terhadap kehadiran mereka. biasanya memang butuh waktu yang panjang sehingga keberadaan mereka bisa di

tekan, serta setiap bagian Pemerintahan yang berperan bisa berkoordinasi dengan baik demi terwujudnya sebuah masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan bermanfaat untuk masyarakat. Untuk pelatihan mungkin kedepannya bentuk dari pelatihannya harus lebih modern dan lebih mengarah pada kemampuan membuat barang jadi yang bernilai ekonomis tinggi dan dapat menjadi pembuka jalan untuk anak jalanan membuat usaha sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana ditampilkan diatas, dan berdasarkan hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menekan angka anak jalanan di Kabupaten Bengkalis terkhusus Kecamatan Mandau, maka pada kesempatan ini peneliti merasa perlu untuk memberikan beberapa saran kepada setiap pemangku kepentingan yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini. saran yang peneliti berikan ini menurut peneliti sendiri cukup relevan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu antara lain :

1. Kepada pemerintah Kabupaten Kecamatan Mandau dalam hal ini adalah Camat Mandau untuk segera melakukan pendataan masyarakat baik untuk anak jalanan dan masyarakat setempat agar ketika memang ada anak jalanan yang masih memiliki orang tua agar dapat terdata dan ini akan membantunya untuk mendapatkan jaminan sosial nasional.
2. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis harus ada inovasi program yang lebih baik dan di butuhkan oleh anak jalanan, mengawasinya

setelah pelatihan di berikan serta membantu untuk menghadirkan usaha mandiri bagi anak jalanan.

3. Kepada UPTD Sosial Kecamatan Mandau agar lebih mendekatkan diri kepada anak jalanan agar aspirasi dan keinginan dari anak jalanan bisa di dengar dan di harapkan kedekatan yang terjalin bisa menghadirkan program yang cocok dan ssesuai agar anak jalanan bisa belajar dan mampu bersaing di dunia kerja dan tidak lagi turun kejalan apalagi melakukan tindakan kriminal.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid S. Susanto. 1979. "Komunikasi Sosial di Indonesia". Bandung : Bina Cipta.
- Awang, Azam dan Mendra, Wijaya, 2012. "Ekologi Pemerintahan". Pekanbaru, Alaf Riau.
- Dunn, William N.2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Ismail, HM, *Etika Briokrasi Dalam Prespektif Manajemen Sumber Daya Manusia*
- Ismani, 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Malang. IKIP Malang.
- Janah, Lailia Faktul. 2009. *Teori Peran*. Jakarta : Gunung Mas.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah, YPAPI, Yogyakarta*.
- Labolo, Muhadam, 2013. "Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya". Jakarta : Rajawali Press.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ndraha Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. "Metodologi Ilmu Pemerintahan". Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. "Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)". Jakarta : PT. Asdy Mahasatya.
- Salam, Dharma Setyawan, 2007. "Manajmeen Pemerintahan Indonesia". Jakarta : Djambatan.
- Sodang P Siagian, 1995, *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. "Ilmu Pemerintahan". Bandung : CV. Mandar Maju.

- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Rafika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Syarbaini, Syahrial, dkk. 2002. *“Sosiologi dan Politik”*. Jakarta : Galia Indonesia.
- Taneko, Soleman, B. 1986. *“Konsepsi sistem sosial dan sistem sosial Indonesia”*. Jakarta : Fajar Agung.
- Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan Publik, CAPS*. Yogyakarta.
- Wirawan, B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta : Kencana Pranada media Group.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teory, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Kota Depok. PT. Rajagrafindo Persada.
- Yuwono, Warsito Teguh. 2001. *“Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru”*. Semarang : CLoGAPPS, Diponegoro University.
- Zulkifli. Awang, Azam dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR

DOKUMEN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002